

IMPLEMENTASI INSTRUKSI BUPATI SIKKA NOMOR 17/HK/2020 TENTANG KEWASPADAAN DINI TERHADAP PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DALAM MENEKAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE DI KABUPATEN SIKKA

MARIA SURYANI
NPP 29.1317

*Asdaf Kabupaten Sikka Provinsi NTT
Program Studi Kebijakan Publik*

Email: 29.1317@praja.ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem (GAP): Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is one of the public health problems in Indonesia with the number of sufferers fluctuating every year and tends to increase and its spread to various regions. Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is an infectious disease caused by the dengue virus and is transmitted by the *Aedes Aegypti* and *Albopictus* mosquitoes. In 2020, Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) is still a problem in Sikka Regency. The Sikka Regency Government stated that the worst case of Dengue Hemorrhagic Fever (DHF) occurred in 2020 and the enactment of an extraordinary event (KLB). **Purpose:** The purpose of this study was to find out how the implementation of the Sikka Regent's Instruction Number 17/HK/2020 concerning Early Alertness to Dengue Hemorrhagic Fever in Sikka Regency. **Method:** The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are interviews, observation and also documentation. **Results/Findings:** Based on the results of the study, it can be seen that the implementation of the Sikka Regent's Instruction Number 17/HK/2020 concerning Early Alertness Against Dengue Hemorrhagic Fever has not run optimally. This is because the communication carried out in the distribution of information has not gone well, the number of implementing staff is not sufficient, there is no strong commitment, and the budget is limited so that there is no incentive for the implementers of the Sikka Regent's Instruction. Suggestions from the author are that it is hoped that more frequent field monitoring should be carried out, the information conveyed must be clear and directed, the appointment of task-implementing staff, a sense of care for the environment and also the community, always carry out evaluations every week and also carry out socialization and counseling related to the Sikka Regent's instructions regarding eradication of dengue hemorrhagic fever in the community and religious pulpits. **Conclusion:** the implementation of the Sikka Regent's Instruction Number 17/HK/2020 Concerning Early Alertness to Dengue Hemorrhagic Fever has gone well with the harmony of the four theoretical indicators.

Keywords: Implementation, Instruction, Dengue Hemorrhagic Fever

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia dengan jumlah penderita yang tiap tahunnya fluktuatif dan cenderung meningkat dan penyeberannya semakin luas ke berbagai wilayah.

Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk *Aedes Aegypti* dan nyamuk *Albopictus*. Pada tahun 2020, penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi masalah di Kabupaten Sikka. Pemerintah Kabupaten Sikka menyatakan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) terparah terjadi pada tahun 2020 dan diberlakukannya kejadian luar biasa (KLB). **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimanakah implementasi Instruksi Bupati Sikka Nomor 17/HK/2020 tentang Kewaspadaan Dini Terhadap Penyakit Demam Berdarah Dengue di Kabupaten Sikka. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan juga dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa implementasi Instruksi Bupati Sikka Nomor 17/HK/2020 tentang Kewaspadaan Dini Terhadap Penyakit Demam Berdarah Dengue belum berjalan maksimal. Hal ini dikarenakan komunikasi yang dilakukan dalam penyaluran informasi belum berjalan dengan baik, jumlah staff pelaksana yang belum mencukupi, belum adanya komitmen yang kuat, dan anggaran yang terbatas sehingga tidak adanya insentif bagi para pelaksana Instruksi Bupati Sikka tersebut. Saran dari penulis ialah diharapkan lebih sering dilakukan pemantauan dilapangan, informasi yang disampaikan harus jelas dan terarah, adanya pengangkatan staff pelaksana tugas, adanya rasa peduli terhadap lingkungan dan juga masyarakat, selalu melakukan evaluasi setiap minggu dan juga melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait instruksi Bupati Sikka mengenai pemberantasan penyakit Demam Berdarah dengue di lingkungan masyarakat maupun mimbar-mimbar agama. **Kesimpulan:** implementasi Instruksi Bupati Sikka Nomor 17/HK/2020 Tentang Kewaspadaan Dini Terhadap Penyakit Demam Berdarah Dengue sudah berjalan dengan baik dengan selarasnya keempat indikator teori.

Kata Kunci : Implementasi, Instruksi, Demam Berdarah Dengue

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Sikka menyatakan kasus demam berdarah dengue (DBD) terparah terjadi pada tahun 2020 dan diberlakukannya kejadian luar biasa (KLB). Walaupun pada tahun 2010, 2013, dan 2016 Kabupaten Sikka juga pernah mengalami kasus kejadian luar biasa (KLB) DBD, namun jumlah kasus pada tahun tersebut sangatlah jauh dari jumlah kasus kejadian luar biasa (KLB) DBD di tahun 2020 yang mencapai 1.816 kasus. Pada tahun 2020 telah 4 kali di perpanjang kejadian luar biasa (KLB) DBD dari awal januari oleh pemerintah Kabupaten Sikka.

kondisi Kabupaten Sikka dalam hal kasus DBD ini masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Pada Mei tahun 2019 lalu, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Bupati Sikka, Nomor: Dinkes. 443.5/90/VII/2019 dalam rangka menurunkan angka kasus DBD. Pemerintah menetapkan program 1 Rumah 1 Juru Pemantau Jentik (Jumantik) agar dapat menanggulangi penyakit DBD. Adapun Instruksi Bupati tersebut ditujukan kepada para Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Puskesmas, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pendampingan Dusun se-Kabupaten Sikka sebagai penanggungjawab dalam terlaksananya instruksi Bupati tersebut.

Realitanya, meskipun sudah ada instruksi Bupati Sika tahun 2019, pada tahun yang sama pula angka kasus DBD masih saja meningkat. Hal ini mendorong dikeluarkannya lagi Instruksi Bupati Sikka Nomor: 17/HK/2020 tentang kewaspadaan dini terhadap penyakit DBD. Didalamnya berisi program seperti Jumat bersih sebagai hari pelaksanaan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Massal di seluruh wilayah Kabupaten Sikka. Bupati Sikka juga menetapkan Camat dan Kepala Desa/Lurah sebagai penanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN)

dengan menggerakkan masyarakat melalui Dusun, RT, dan RW di Wilayah kerja masing-masing. Camat dan Kepala Desa/Lurah berkoordinasi dengan Puskesmas di wilayah kerja masing-masing untuk membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) penanggulangan kasus DBD di tingkat kecamatan dan desa, dan mengaktifkan program 1 Rumah 1 Jumantik (juru pemantau jentik). Kepala Desa/Lurah wajib mengalokasikan anggaran dari dana Desa/Kelurahan untuk kegiatan penanggulangan kasus DBD di wilayah kerja masing-masing.

Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai peningkatan kasus DBD di Kabupaten Sikka pada tahun 2020. Sayangnya masih sama seperti tahun 2019, kasus DBD di tahun 2020 tetap mengalami peningkatan bahkan kasusnya melonjak naik secara signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang cukup serius, apakah implementasi instruksi Bupati Sikka sudah diterapkan sesuai dengan Standar Operasional prosedur (SOP) atau tidak. Boleh jadi dalam proses pelaksanaannya masih terdapat banyak kelemahan seperti kurangnya pengawasan dan pengendalian dari pihak pemerintah atau minimnya komunikasi antar komponen pelaksana instruksi Bupati Sikka tersebut.

Hal ini kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang “IMPLEMENTASI INSTRUKSI BUPATI SIKKA NOMOR 17/HK/2020 TENTANG KEWASPADAAN DINI TERHADAP PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DALAM MENEKAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE DI KABUPATEN SIKKA” untuk mengkaji lebih jauh terkait proses pelaksanaan instruksi tersebut mengingat masih terjadinya kasus DBD di Kabupaten Sikka yang cukup memprihatinkan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

kondisi Kabupaten Sikka dalam hal kasus DBD ini masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Pada Mei tahun 2019 lalu, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Bupati Sikka, Nomor: Dinkes. 443.5/90/VII/2019 dalam rangka menurunkan angka kasus DBD. Pemerintah menetapkan program 1 Rumah 1 Juru Pemantau Jentik (Jumantik) agar dapat menanggulangi penyakit DBD. Adapun Instruksi Bupati tersebut ditujukan kepada para Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Puskesmas, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pendampingan Dusun se-Kabupaten Sikka sebagai penanggungjawab dalam terlaksananya instruksi Bupati tersebut.

Realitanya, meskipun sudah ada instruksi Bupati Sika tahun 2019, pada tahun yang sama pula angka kasus DBD masih saja meningkat. Hal ini mendorong dikeluarkannya lagi Instruksi Bupati Sikka Nomor: 17/HK/2020 tentang kewaspadaan dini terhadap penyakit DBD. Didalamnya berisi program seperti Jumat bersih sebagai hari pelaksanaan Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Massal di seluruh wilayah Kabupaten Sikka. Bupati Sikka juga menetapkan Camat dan Kepala Desa/Lurah sebagai penanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan menggerakkan masyarakat melalui Dusun, RT, dan RW di Wilayah kerja masing-masing. Camat dan Kepala Desa/Lurah berkoordinasi dengan Puskesmas di wilayah kerja masing-masing untuk membentuk Tim Gerak Cepat (TGC) penanggulangan kasus DBD di tingkat kecamatan dan desa, dan mengaktifkan program 1 Rumah 1 Jumantik (juru pemantau jentik). Kepala Desa/Lurah wajib mengalokasikan anggaran dari dana Desa/Kelurahan untuk kegiatan penanggulangan kasus DBD di wilayah kerja masing-masing.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, . Penelitian oleh Wardati, Zulmasyhur dan Susanti pada tahun 2020 berjudul Implementasi Kebijakan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan metode kualitatif untuk memahami bagian kehidupan manusia berdasarkan gambaran menyeluruh (holistic) dan kompleks dengan informan berjumlah 15

orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih belum efektif. Perlu ada interpretasi yang sama dalam hal keterkaitan pengendalian penyakit DBD di setiap perangkat daerah yang ada di Pemerintah Jakarta Barat maupun pelaksana-pelaksana kebijakan tersebut di Kecamatan Tambora Jakarta Barat.

Kedua, Penelitian oleh Novalia pada tahun 2016, berjudul Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Puskesmas Kedungmundu menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan DBD di Puskesmas Kedungmundu belum berjalan maksimal. Standar dan tujuan yang belum jelas, sumber manusia yang belum cukup, sarana prasarana maupun dana sudah memadai, komunikasi antar organisasi yang sudah baik, lingkungan masyarakat yang kurang mendukung, sikap pelaksana yang kurang tegas.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi di lokus Penulis.

1.5 Tujuan.

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Instruksi Bupati Nomor 17/HK/2020 tentang Kewaspadaan Dini terhadap Penyakit Demam Berdarah Dengue dalam menekan kasus demam berdarah (DBD) di Kabupaten Sikka

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian menurut (Sugiyono, 2016) dimana menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif agar peneliti dapat menganalisis dan menggambarkan fenomena penelitian peneliti dengan lengkap dan runtut berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian yang bermakna. Dalam penelitian ini, peneliti menghimpun data dengan melakukan teknik yang meliputi wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*taking notes*). Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Simangunsong, 2016).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. IMPLEMENTASI INSTRUKSI BUPATI SIKKA NOMOR 17/HK/2020 TENTANG KEWASPADAAN DINI TERHADAP PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE DALAM MENEKAN KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE DI KABUPATEN SIKKA

Pada penelitian ini penulis memfokuskan dengan dimensi dan indikator yang mengacu pada teori (Edward III, 2003) dimana indikator pengukuran meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

A. KOMUNIKASI

- Komunikasi secara harafiah berarti adanya interaksi antara dua orang atau lebih untuk memberikan atau menyampaikan informasi. Secara umum bisa dikatakan bahwa komunikasi adalah memberikan pengetahuan kepada orang lain. Komunikasi merupakan kegiatan berupa penyampaian informasi, gagasan, ide dari satu pihak kepada pihak yang lain dalam bentuk lisan atau verbal. Komunikasi yang baik terjadi apabila yang menerima

informasi, pesan, gagasan, dan ide dapat menerima dan mengerti hal tersebut. Komunikasi bisa terjadi antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Kesuksesan suatu program yang dilaksanakan harus memenuhi beberapa tolak ukur atau indikator keberhasilan hal ini tidak lepas dari usaha para implementor dalam mempertimbangkan segala tindakan yang akan dilakukan kedepannya. Perintah yang telah diberikan harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum akhirnya dapat dilaksanakan sehingga dapat diminimalisir adanya digresi implementasi di lapangan. Tentu saja komunikasi yang berlangsung harus akurat dan dimengerti dengan cermat oleh pelaksana. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran sehingga kemungkinan akan terjadi perlawanan dari kelompok sasaran.

- Analisis fokus penelitian ini mengkaji bagaimana komunikasi yang terjadi dalam pengimplementasian Instruksi Bupati Sikka Nomor 17/HK/2020 tentang Kewaspadaan Dini terhadap Penyakit Demam Berdarah Dengue ini dapat berjalan dengan baik. Implementasi ini dapat berjalan dengan efektif apabila proses komunikasi baik secara horizontal maupun vertikal terjalin dengan baik. Berdasarkan data di atas dapat dikatakan bahwa komunikasi yang dibangun oleh para implementor atau pelaksana belum berjalan dengan baik antara implementor dengan masyarakat terkhususnya sasaran dari instruksi bupati tersebut. Secara umum dalam teori Edward III membahas tiga hal penting yang menjadi indikator keberhasilan dalam proses komunikasi program yaitu: transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi dalam informasi.
- dalam penyaluran informasi terkait Instruksi Bupati Sikka Nomor 17/HK/2020 masih mengalami kendala, dimana informasi yang diterima tidak disampaikan dengan baik dan konsisten kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan respon dari masyarakat tidaklah seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut.
- indikator kejelasan pada implementasi Instruksi Bupati Sikka Nomor 17/HK/2020 telah sesuai dengan teori implementasi menurut Edward III yang menyebutkan bahwa petunjuk pelaksanaan kebijakan harus memiliki kejelasan dan tidak membingungkan sehingga pelaksana kebijakan dapat memahami dan menerima kebijakan tersebut. Pada Instruksi Bupati Sikka Nomor 17/HK/2020 kejelasannya sudah baik karena pelaksanaannya sudah mempunyai pedoman seperti petunjuk teknis pelaksanaan dan sudah ada pedoman hukum yang mengatur pelaksanaan instruksi bupati tersebut.

B. SUMBER DAYA

- Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi karena akan mendukung kebijakan dalam menjalankan implementasi. Sumber daya yang dimaksud berkaitan dengan kapabilitas pelaksanaan kebijakan publik dalam mengimplementasikan agar kebijakan berjalan dengan efektif dan efisien. Perintah-perintah pelaksanaan program mungkin diteruskan secara cermat, jelas, dan konsisten tapi jika para pelaksana kekurangan sumber- sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber daya dapat merupakan faktor penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Aspek yang berkaitan dengan sumber daya adalah staf, wewenang, informasi, dan fasilitas.
- indikator staf masih perlu untuk ditambah lagi karena kondisi geografis Kabupaten Sikka yang memiliki daerah yang sulit untuk dijangkau sehingga perlu ditingkatkan lagi jumlah staf pelaksana pada wilayahwilayah. sesuai dengan teori implementasi Edward III

yang menyebutkan bahwa untuk mencapai implementasi kebijakan yang baik maka dibutuhkan sumber daya manusia berupa staf yang berkompetensi dan memiliki keahlian yang mendukung dalam menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan. Maka penulis berkesimpulan bahwa staff yang ada saat ini yang berperan dalam pelaksanaan Instruksi Bupati Sikka Nomor 17/HK/2020 masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksana instruksi bupati tersebut. Selain itu informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan pelaksanaan Instruksi Bupati Sikka sudah jelas dan dapat dimengerti oleh masyarakat dengan mudah sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan tujuan.

C. DISPOSISI

- Disposisi adalah salah satu faktor yang memiliki konsekuensi penting dalam implemetasi kebijakan yang efektif. Disposisi menyangkut sikap positif atau komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan untuk mencapai tujuan. Keinginan kuat dari pelaksana sangat diharapkan agar tujuan dari program dapat tercapai. Macam-macam elemen yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk melaksanakan suatu program yaitu pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan. Respon dari para pelaksana kebijakan akan berimbang pada kemampuan mereka dalam melaksanakan program, pemahaman pelaksana kebijakan tentang suatu program akan merujuk pada tanggapan mereka, apakah mereka akan menerima, netral ataupun menolak. Dalam disposisi terdapat tiga unsur yang mempengaruhi antara lain.
- komitmen Pemerintah Kabupaten Sikka dalam mengatasi kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Sikka belumlah optimal. Hal ini dapat dilihat pada jumlah kasus demam berdarah di Kabupaten Sikka yang pada bulan januari tahun 2022 kembali meningkat jika dibandingkan dengan jumlah kasus pada bulan januari tahun 2021.
- walaupun tidak adanya insentif bagi pelaksana instruksi bupati tersebut, para pelaksana tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

D. STRUKTUR BIROKRASI

- Secara umum struktur birokrasi merupakan suatu bagian yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan. Pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan, fasilitas pendukung, wewenang, dsb. Apabila struktur organisasi tidak kondusif maka akan menghambat jalannya suatu kebijakan. Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara dan pelaksana implementasi kebijakan publik.
- pelaksanaan Instruksi Bupati Sikka Nomor 17/HK/2020 memiliki ketimpangan, dimana hasil wawancara dan fakta yang ada tidaklah sesuai. Hal ini dapat menyebabkan terdistorsinya informasi mengenai standar operasionalisasi prosedurnya.
- Peran dari masing-masing pelaksana memang sangat berpengaruh dalam keberhasilan dari suatu kebijakan, tiap orang harus mengetahui tugasnya dengan baik agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan sinergis sesuai dengan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka mengatakan bahwa selama proses berjalannya Instruksi Bupati Sikka Nomor 1/H/2020, masing- masing aktor terkait

dominan dan tidak dominan, perannya sangat bergantung waktu, dalam artian dalam waktu dan kondisi tertentu seseorang atau beberapa aktor bisa mendominasi dan bisa tidak mendominasi.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penting pertama yang ditemukan oleh penulis ialah terdapat perbedaan mendasar yang menunjukkan kebaruan penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardati, Zulmasyhur dan Susanti tahun 2020 berjudul Implementasi Kebijakan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat menggunakan metode kualitatif untuk memahami bagian kehidupan manusia berdasarkan gambaran menyeluruh (holistic) dan kompleks dengan informan berjumlah 15 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih belum efektif. Perlu ada interpretation yang sama dalam hal keterkaitan pengendalian penyakit DBD di setiap perangkat daerah yang ada di Pemerintah Jakarta Barat maupun pelaksana-pelaksana kebijakan tersebut di Kecamatan Tambora Jakarta Barat. Kemudian, penulis sepakat dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novalia pada tahun 2016, berjudul Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Puskesmas Kedungmundu menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan DBD di Puskesmas Kedungmundu belum berjalan maksimal. Standar dan tujuan yang belum jelas, sumber manusia yang belum cukup, sarana prasarana maupun dana sudah memadai, komunikasi antar organisasi yang sudah baik, lingkungan masyarakat yang kurang mendukung, sikap pelaksana yang kurang tegas.

Temuan utama yang menunjukkan kebaruan hasil penelitian penulis dibandingkan penelitian terdahulu lainnya selain metode, informan dan lokus ialah penulis mendapati bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Sikka dalam mengatasi kasus demam berdarah dengue di Kabupaten Sikka belumlah optimal. Hal ini dapat dilihat pada jumlah kasus demam berdarah di Kabupaten Sikka yang pada bulan januari tahun 2022 kembali meningkat jika dibandingkan dengan jumlah kasus pada bulan januari tahun 2021.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan implementasi Instruksi Bupati Sikka Nomor 17/HK/2020 Tentang Kewaspadaan Dini Terhadap Penyakit Demam Berdarah Dengue, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komunikasi pada dasarnya tidak perlu dilaksanakan, hal ini dikarenakan kebijakan tersebut bersifat instruksi dimana kebijakan tersebut adalah perintah.
2. Sumber daya yang ada di Dinas Kesehatan masih kurang dalam hal tenaga kerja, dimana jumlah tenaga kerja belum seimbang dengan cakupan wilayah kerja
3. Disposisi, komitmen dari pelaksana yang masih kurang hal ini dibuktikan dengan kurangnya para pelaksana program yang turun kelapangan, sehingga menyebabkan jumlah kasus demam berdarah dengue masih meningkat, sedangkan untuk insentif tidak dapat diberikan. Hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran untuk pemberian insentif.
4. Struktur Birokrasi, pada struktur birokrasi, pelaksanaan instruksi bupati sudah berjalan dengan baik dan lancar namun dalam menjalankan instruksi Bupati Sikka tersebut, standar operasional prosedur yang digunakan belum jelas. Hal ini dikarenakan belum adanya penetapan secara resmi standar 94 operasional prosedur dari instruksi Bupati Sikka tersebut. Sedangkan untuk pembagian wewenang telah dibagi merata..

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa untuk menambah rekomendasi, mengatasi permasalahan yang ada serta mencegah permasalahan krusial baru muncul.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar- besarnya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Edwards III, George C. (2003). *Implementing Public Policy*. Jakarta

Novalia, Rizky Fadilah. (2016). *Analisis Implementasi Peraturan Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Puskesmas Kedungmundu*. Diss. Universitas Negeri Semarang.

Simangunsong, Fernandes. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Wardati, W., Zulmasyhur, Z., & Susanti, S. (2020). *Implementasi Kebijakan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Di Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat*. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2), 121-140.